



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jl. Jenderal Gatot Subroto KM. 5,5 Medan - 20122
Telp: (061) 8474847 (Hunting), Fax : (061) 8472842
Website <http://www.bpkp.go.id/sumut>, e-mail: sumut@bpkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sihar Panjaitan
Jabatan : Kepala Perwakilan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ardan Adiperdana
Jabatan : Kepala BPKP

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

Ardan Adiperdana
Ardan Adiperdana
NIP 19590616 197911 1 001

Denpasar, 19 Januari 2018

Pihak Pertama,

Sihar Panjaitan
NIP 19581020 198203 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET		
			Satuan	Jumlah	
1		2		3	4
A. Sasaran Program		Indikator Kinerja Program			
1.	Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi	1.1	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	%	60
		1.2	Persentase BUMN/ anak perusahaan dengan skor GCG baik	%	70
		1.3	Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina	%	55
		1.4	Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina	%	55
2	Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian	2.1	Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan di Pengadilan	%	50
		2.2	Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH	%	72
		2.3	Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	65
		2.4	Persentase Hasil Audit Penyusutan Harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	75
		2.5	Persentase Hasil Audit Klaim Yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	75
3	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintah dan Korporasi dalam Pencegahan Korupsi	3.1	Persentase K/L/P/K Yang Mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)	%	52
4	Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat terhadap Korupsi	4.1	Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajaran Anti Korupsi (KPAK) Yang Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat	%	65
5	Meningkatnya kualitas penerapan SPPP Pemda	5.1	Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPPP Level 2	%	100
		5.2	Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPPP Level 3	%	52
		5.3	Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPPP Level 2	%	48
6	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda	6.1	Persentase APPP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3	%	100
		6.2	Persentase APPP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3	%	52
		6.3	Persentase APPP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 2	%	48
B Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan			
1.	Tersedianya informasi hasil pengawasan 260 PSN di perwakilan	1.1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN BPKP Perwakilan	Laporan	117
2.	Tersedianya informasi hasil pengawasan siskeudes di perwakilan	2.1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes BPKP Perwakilan	Laporan	13
3.	Tersedianya informasi hasil pengawasan penerapan SIMDA di perwakilan	3.1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA BPKP Perwakilan	Laporan	3
4.	Tersedianya informasi hasil pengawasan 10 prioritas nasional	4.1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan	Laporan	131
5.	Tersedianya informasi hasil pembinaan SPPP perwakilan	5.1	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPPP BPKP Perwakilan	Laporan	43
6.	Tersedianya informasi hasil pembinaan kapabilitas APTP perwakilan	6.1	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APTP BPKP Perwakilan	laporan	57

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		Satuan	Jumlah
1	2	3	4
A Sasaran Program	Indikator Kinerja Program		
1. Tersedianya Dukungan Teknis Keputasan atas Pelayanan Sekretariat Utama	1.1 Keputasan atas Pelayanan Sekretariat Utama (skala likert 1-10)	skala	8
B Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		
1. Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai keputasan layanan	1.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	laporan	68
2. Temantantkannya Aset secara optimal	2.1 Tersedianya perangkat pengolahan data dan komunikasi BPKP Perwakilan	unit	14
	2.2 Tersedianya peralatan fasilitas perkantoran	unit	15

Kegiatan

Anggaran

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| 1. Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan Penyelenggaraan SPIP | Rp. | 6.310.853.000,00 |
| 2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP | Rp. | 33.431.227.000,00 |
| 3. Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP | Rp. | 1.006.210.000,00 |
| 4. Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana | Rp. | 231.000.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 40.979.290.000,00 |



Kepala BPKP,

Ardian Adiperdana

NIP 19590616 197911 1 001

Kepala Perwakilan,

Denpasar, 19 Januari 2018

Sihar Manjatan

NIP 19581020 196203 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TRIWULANAN TAHUN 2018
PERWAKILIAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA**

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET		Target Trw I		Target Trw II		Target Trw III		Target Trw IV		Target Setahun					
				Satuan	3	Jumlah	4	Jumlah	5	Jumlah	6	Jumlah	7	Jumlah	8				
A. Sasaran Program		1		Indikator Kinerja Program		2		3		4		5		6		7		8	
1. Perubahan pengelolaan program prioritas nasional dan pengalihan keuangan negara/korporasi		1.1 Persentase Tidak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan		%	0	20	40	60	70	70	60	70	70	60					
		1.2 Persentase BUMN/ anak perusahaan dengan skor GCG baik		%	0	0	40	40	40	40	40	40	40	40					
		1.3 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina		%	0	0	40	40	40	40	40	40	40	40					
		1.4 Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina		%	0	0	40	40	40	40	40	40	40	40					
2. Meningkatkan Efektifitas Hasil Pengawasan Keinvestigasi		2.1 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasi yang dimanfaatkan di Pengadilan		%	0	20	30	50	50	50	50	50	50						
		2.2 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasi yang dimanfaatkan oleh APH		%	0	0	40	40	40	40	40	40	40						
		2.3 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasi yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K		%	0	0	40	40	40	40	40	40	40						
		2.4 Persentase Hasil Audit Penyusunan Harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K		%	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		2.5 Persentase Hasil Audit Kalori Yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K		%	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3. Meningkatkan Kualitas Tatakelola Pemerintah dan Korporasi dalam Pencegahan Korupsi		3.1 Persentase K/L/P/K Yang Mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)		%	0	0	50	52	52	52	52	52	52						
4. Meningkatkan Kepekaan K/L/P/K dan Masyarakat terhadap Korupsi		4.1 Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAAK) Yang Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat		%	0	0	50	65	65	65	65	65	65						
		5.1 Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SRIP Level 2		%	0	0	0	100	100	100	100	100	100						
		5.2 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SRIP Level 3		%	12	24	36	52	52	52	52	52	52						
		5.3 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SRIP Level 2		%	9	22	35	48	48	48	48	48	48						
6. Meningkatkan kapabilitas pengawasan Intern Penda		6.1 Persentase ATPP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3		%	0	0	0	100	100	100	100	100	100						
		6.2 Persentase ATPP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3		%	6	23	40	52	52	52	52	52	52						
		6.3 Persentase ATPP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 2		%	45	46	47	48	48	48	48	48	48						
B. Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		3		4		5		6		7		8					
1. Tersedianya informasi hasil pengawasan 260 FSN di perwaktian		1.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN BPKP Perwaktian		Laporan	0	26	26	65	65	65	65	65	117						
2. Tersedianya informasi hasil pengawasan stakeudis di perwaktian		2.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Stakeudis BPKP Perwaktian		Laporan	2	3	3	5	5	5	5	5	13						
3. Tersedianya informasi hasil pengawasan penerapan SIMDA di seluruh perwaktian		3.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA BPKP Perwaktian		Laporan	0	3	3	0	0	0	0	0	3						
4. Tersedianya informasi hasil pengawasan 10 prioritas nasional		4.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwaktian		Laporan	8	37	37	41	45	45	45	45	131						
5. Tersedianya informasi hasil pembinaan SRIP perwaktian		5.1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SRIP BPKP Perwaktian		Laporan	12	14	14	6	6	6	6	6	43						
6. Tersedianya informasi hasil pembinaan kapabilitas ATPP perwaktian		6.1 Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas ATPP BPKP Perwaktian		Laporan	0	12	12	37	37	37	37	37	57						

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Target Trw I	Target Trw II	Target Trw III	Target Trw IV	Target Setahun
		Satuan	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
		3	4	5	6	7	8
A Sasaran Program	Indikator Kinerja Program						
1. Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama	1.1 Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama (skala likert 1-10)	skala	0	0	0	8	8
B Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan						
1. Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan	1.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	laporan	8	17	18	25	14
2. Temuannya aset secara optimal	2.1 Tersedianya perangkat pengolahan data dan komunikasi BPKP Perwakilan 2.2 Tersedianya perbaikan fasilitas pertanahan	unit	14 15	0 0	0 0	0 0	14 15
1. Pelaksanaan Pengawasan Sistem Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan Penyelenggaraan SPIP		Rp	1.347.249.240,00	1.845.798.840,00	2.121.940.010,00	995.864.970,00	6.310.853.000,00
2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP		Rp	7.609.162.161,00	9.771.943.206,00	8.440.955.462,00	7.609.166.171,00	33.431.227.000,00
3. Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP		Rp	307.095.000,00	263.895.000,00	168.035.000,00	267.185.000,00	1.006.210.000,00
4. Pengadaan dan Penyuluran Sarana dan Prasarana		Rp	231.000.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000.000,00
	Jumlah	Rp	9.494.506.407,00	11.881.637.046,00	10.730.930.472,00	8.872.216.081,00	40.979.280.000,00

Dempasar, 19 Januari 2018

Kepala Perwakilan,

Sihar Puspitan

NIP 19581020 198203 1 001

Kepala BPKP,



Ardian Adipardana

NIP 19590616 197911 1 001

